

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR NIAS SELATAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Nias Selatan)

Benny Octavianus Sihotang *

Kepolisian Resor Nias Selatan senantiasa melakukan upaya dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia, bagaimana peran kepolisian dan masyarakat dalam memberantas peredaran narkotika di Kepolisian Resor Nias Selatan, bagaimana kendala dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di Kepolisian Resor Nias Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Resor Nias Selatan. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Pengaturan hukum peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Nias Selatan ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dimana pengedar tersebut dikenakan sanksi dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati sebagaimana terdapat di Pasal 114 dan 119. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Peran kepolisian dan masyarakat dalam memberantas peredaran narkotika di Kepolisian Resor Nias Selatan adalah meliputi upaya penanggulangan secara *non penal policy* yaitu upaya *pre-emptif* (penyuluhan) dan *preventif* (pencegahan). Upaya *pre-emptif* yang dilakukan adalah dilakukan patroli dialogis sedangkan upaya *preventif* yang dilakukan adalah dengan melakuka razia-razia di tempat-tempat hiburan malam. Upaya penanggulangan secara *penal policy* lebih menitikberatkan pada tindakan *represif* (penindakan secara langsung). *Represif* (penindakan secara langsung) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah guna memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa Kendala pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Nias Selatan adalah disebabkan keterbatasan personil penyidik, keterbatasan anggaran serta kemampuan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peredaran, Narkotika

* Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

LAW ENFORCEMENT OF NARCOTICS DISTRIBUTION IN POLICE AREA OF

**SOUTH NIAS RESORT VIEWED FROM LAW
NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS
(Case Study at the South Nias Resort Police)**

ABSTRACT

Benny Octavianus Sihotang *

The South Nias Resort Police always makes efforts to reduce the level of abuse and illicit trafficking of narcotics. The formulation of the problem in this research is how to regulate the eradication of narcotics circulation in Indonesia, what is the role of the police and the community in eradicating narcotics circulation in the South Nias Resort Police, what are the constraints and efforts of the police in eradicating narcotics circulation in the South Nias Resort Police.

This research is a descriptive analysis research that leads to empirical juridical research. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from research at the South Nias Resort Police. Data collection tools are library research and field research.

The legal arrangements for narcotics distribution in the jurisdiction of the South Nias Resort Police are stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely where those dealers are subject to sanctions with the heaviest penalty, namely the death penalty as contained in Articles 114 and 119. The spirit and purpose of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is to prevent and eradicate the illicit circulation of narcotics in Indonesia. The role of the police and the community in eradicating narcotics circulation in the South Nias Resort Police includes non-penal policy coping efforts, namely pre-emptive (education) and preventive (prevention) efforts. Pre-emptive efforts are carried out by conducting dialogic patrols while preventive efforts are carried out by carrying out raids at night entertainment venues. Penal policy coping efforts focus more on repressive actions (direct action). Repressive (direct action) carried out by the Police is to provide a deterrent effect for perpetrators of narcotics crimes.

Based on the results of the discussion it is known that the obstacles to eradicating narcotics distribution in the jurisdiction of the South Nias Resort Police are due to limited investigator personnel, budget constraints and the ability of investigators in the process of investigating narcotics crimes

Keywords: Law Enforcement, Circulation, Narcotics.

** Students of the Postgraduate Program in Legal Sciences, Islamic University of North Sumatra.*